

Pengantar

Hubungan Feminisme dan Habermas

Gadis Arivia

Departemen Filsafat/FIB/Universitas Indonesia & Pendiri Jurnal Perempuan
gadis.arivia.e@gmail.com

Setiap hubungan hampir selalu mengalami masa pasang dan surut, kadang mulus dan kadang bergejolak. Hubungan antara feminisme dan Habermas mengisahkan pasangan yang saling membutuhkan namun juga saling mencurigai. Hal tersebut tercermin pada esei-esei yang terdapat di dalam buku ini.

Meski hubungan pemikiran feminisme dan Habermas seringkali bersitegang, tak dapat dipungkiri beberapa konsep Habermas diapresiasi oleh para feminis dan tentu membantu pergerakan feminisme. Beberapa esei di dalam buku ini mengupas ketegangan tersebut terutama pada karya Habermas, *The Theory of Communicative Action* dan *The Structural Transformation*. Meskipun demikian, para feminis patut berterima kasih atas pencerahan Habermas terutama tentang teori diskursus dan refleksinya terhadap politik, moral dan norma- norma sosial. Sebab feminisme mempermasalahkan hubungan gender yang dikonstruksikan dan disetir secara politis. Sehingga teori feminisme membutuhkan alat untuk mengklarifikasikan struktur sosial dan politik serta memperlihatkan bagaimana gender diproduksi dan direproduksi. Teori Habermas dapat digunakan untuk menjernihkan hal tersebut.

Namun, sebagaimana yang diamati oleh Dewi Candraningrum, meski teori Habermas berusaha mengklarifikasi dengan demikian kritis terhadap bangunan sosial/budaya dan sistem, akan tetapi, sikap kritis Habermas sama sekali tidak menyentuh persoalan ketidakadilan perempuan. Padahal Habermas berbicara banyak soal ketidakadilan. “Jika adil ditawarkan kepada mereka, maka mereka harus mempertanyakan beratus perihal: apakah kami boleh berpikir? Apakah kami boleh berekspresi? Apakah kalian akan menertawakan kami?”, protes Candraningrum di dalam esainya.

Kritik-kritik yang dilontarkan terhadap Habermas oleh kaum feminis menurut saya bermuara pada masalah diskusi Habermas tentang “public use of reason.” Menurut Habermas pembentukan akal sehat di ruang publik terjadi di dalam perdebatan dan diskusi masyarakat intelektual dan borjuis di tempat-tempat umum pada masa itu seperti di café-café dan tempat makan dan minum lainnya. Di abad 21 pembentukan diskursus dapat dikatakan terjadi pula di media sosial, twitter dan facebook. Diskursus yang berkembang di tempat umum ini penting karena pembentukan diskursus tidak lagi didominasi oleh Negara atau otoritas agama melainkan oleh masyarakat kelas menengah. Mereka dapat memproduksi narasi-narasinya lewat berbagai produk budaya apakah sastra, musik, bedah buku, dan lain sebagainya. Dalam pandangan Habermas model ini

adalah model yang inklusif, model yang mengutamakan *public of citizens*. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan bagi para feminis adalah apakah “public use of reason” tersebut menyertakan perempuan yang kebanyakan tinggal di rumah atau sibuk mengurus domestik dan tidak berada di dalam perputaran diskursus publik? Oleh sebab itu, esei yang ditulis Angelika Riyandari menjadi menarik. Riyandari menyoroti keterpinggiran wacana publik pada majalah wanita dan mempertanyakan inklusifitas perempuan di dalam “public reason” tersebut. Sebagai contoh Riyandari mempertanyakan kecerdasan pilihan politik perempuan bila diskursus publik yang disajikan tidak menyentuh pembaca perempuan karena majalah-majalah wanita dalam hal pilpres baru-baru ini tidak memperdebatkannya atau menyajikan pemikiran-pemikiran kritis perempuan terhadap hal tersebut. Jadi bagaimana bisa dikatakan bahwa perempuan ikut di dalam “public use of reason?”

Masalah utama yang mengganggu pada pemikiran Habermas dan dikritik habis-habisan oleh kaum feminis adalah pemisahannya pada diskursus yang universal. Divisi struktural antara ranah publik dan privat yang dibedakan Habermas, yakni, terdapat di satu sisi pasar dan di sisi lain keluarga/domestik, mengkhawatirkan para feminis karena adanya pemisahan ranah privat dan ranah publik. Dengan prinsip universalitas yang dianut Habermas, ia tidak melihat diskursus partikularitas perempuan yang dipinggirkan (yang berada di ranah privat) dan tidak melihat manipulasi diskursus laki-laki yang bertumpu pada argumen universal. Persoalan ini jelas tergambar pada esei Rika Saraswati yang menyoroti masalah demokrasi di Indonesia. Apakah keputusan kebijakan-kebijakan dapat dikatakan adil bila pertimbangan yang partikular/domestik (ranah privat) tidak menjadi pertimbangan? Esei Anita Dhewy tentang politik dan perempuan secara nyata berbicara tentang masalah ini. Kepentingan-kepentingan partai politik seringkali mendominasi dan meminggirkan kepentingan-kepentingan perempuan.

Sebagai pembanding teori, Saraswati menyinggung pemikiran Iris Marion Young yang dapat meyarakan suara-suara terpinggirkan karena dibungkam oleh konsep universal. Di sinilah masalah terbesar pemikiran Habermas sebab persoalan abad 21 tidak dapat diakomodasi. Candraningrum menyatakan, “ada problem besar dalam perspektif Habermas... Dia memiliki batas, yang meminggirkan gender ketiga (LGBTIQ), atau para liyan yang berada di luar agama mainstream, atau Liyan yang mengejawantah dalam masyarakat Adat (yang tak mengenal apa itu Negara atau apa itu demokrasi, dll).”

Sejalan dengan Candraningrum, Donny Danardono terganggu oleh komunikasi demokrasi yang tidak melihat perbedaan atau partikularitas. Danardono menawarkan pemikiran filsuf Ranciere sebagai pembanding teori. Ranciere di satu pihak sama dengan Habermas dalam arti ingin memberikan perhatian pada keutuhan diskusi filsafat, politik, seni, estetika, film dan lain-lain yang berkontribusi pada pembentukan diskursus dan distribusinya (*le partage du sensible*). Distribusi ini menurut Ranciere memberikan berbagai kemungkinan (*possibility*) dan juga ketidakkemungkinan (*impossibility*). Apa yang hendak diperjuangkan oleh Ranciere adalah bahwa pandangan ini didistribusikan bukan untuk memformulasi pengetahuan dan cara berpikir semata akan tetapi yang lebih penting untuk melakukan perubahan. Cara melihat yang berbeda perlu didistribusikan agar terjadi perubahan di dalam masyarakat.

Pada akhirnya, kritik terhadap Habermas oleh kaum feminis bertumpu pada peniadaan “perbedaan” oleh Habermas. Sebab pada soal inilah para feminis ingin menggarisbawahi bahwa eksistensi perempuan atau kelompok minoritas lainnya yang tidak dapat disamakan keadaannya atau digeneralisir. Kelompok minoritas memiliki keterbatasan atau kondisi khusus yang harus diperhatikan. Namun, perlu juga dipikirkan apakah memajukan konsep “perbedaan” dapat membantu keadaan perempuan dengan sungguh-sungguh. Sebab apabila di suatu kebiasaan adat mereka mengedepankan argumen “perbedaan” untuk menindas perempuan, maka, hal ini menyulitkan perempuan. Karena di satu sisi perempuan ingin dianggap setara dan sama hak-haknya di depan hukum dan Tuhan, di lain pihak memang ada perbedaan yang membuat perempuan dan kelompok minoritas membutuhkan perhatian khusus. Pada titik ini, mungkin pemikiran Habermas tentang *discourse ethics* menjadi menarik.

Etika diskursus Habermas mengikuti analisa interaksi komunikatif dimana “para peserta mengkoordinasikan rencananya secara “konsensus” (Habermas, 1981). Inti tindakan konsensus ini disebabkan karena Habermas mencemaskan bisa terjadi ketegangan antara etika diskursus yang ada dan dapat mendominasi masyarakat yang plural. Oleh sebab itu, prinsip universal seperti kebebasan dan kesetaraan patut dibela karena bila tidak ada prinsip universal tersebut, lalu, bagaimanakah kelompok minoritas dapat menuntut hak-haknya dengan adil? Inilah yang menjadi dilema para feminis dan esei-esei di dalam buku ini telah mengupas dan mengunyahnya dengan sangat baik.